

IMPLIKASI INFLASI SPIRAL INGGRIS TERHADAP UNI EROPA DAN INDONESIA

Ziyad Falahi

Abstrak

Inggris yang diambang resesi akan menjadi topik yang hangat pasca-terpilihnya Perdana Menteri Inggris yang baru, Liz Truss, di tengah ancaman inflasi spiral. Oleh karena itulah, tulisan ini akan mencoba menelaah efek lanjutan dari peristiwa inflasi spiral di Inggris serta implikasinya terhadap Uni Eropa dan Indonesia. Fakta menunjukkan, adanya ketergantungan Uni Eropa terhadap Inggris merupakan lampu kuning bagi terjadinya resesi dalam skala regional Eropa. Kondisi tersebut terefleksikan dari inflasi yang juga terjadi di Uni Eropa sebagai multiplier effect dari inflasi di Inggris. Dalam kerangka Kerja Sama CEPA, inflasi di Zona Euro bisa saja berimplikasi kepada Indonesia yang sedang mengembangkan sektor infrastruktur. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan, termasuk melalui rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri perlu memastikan bahwa inflasi spiral yang terjadi di Inggris dan Eropa tidak akan membawa dampak negatif kepada Indonesia, tetapi sebaliknya bisa dimanfaatkan untuk membangun kerja sama konstruktif, antara lain dalam kerangka pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur.

Pendahuluan

Inggris kembali diuji setelah mengalami dinamika internal yang memanas pasca-turunnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri (PM) yang kesulitan dalam menghadapi inflasi terbesar dalam sejarah Inggris. Pada akhir pidatonya sebagai PM Inggris, Boris Johnson dengan nada pesimistis mengatakan bahwa perekonomian Inggris dapat mengalami kemunduran seperti tahun 1970. Inggris kini tengah mengupayakan

kenaikan upah, dan mewacanakan pemotongan pajak sebagai stimulus fiskal yang baru, yang terjadi setelah 40 tahun sebagai respons atas inflasi spiral yang menyulitkan pemerintahan Boris Johnson. Namun, inflasi yang menginjak angka sepuluh persen tersebut dapat saja diartikan sebagai kebijakan populis mengingat PM Inggris yang baru, Liz Truss, juga sedang merencanakan untuk menyediakan living cost bagi masyarakat. Tekanan dari rekan sesama Partai Konservatif



Rishi Sunak yang mengingatkan bahayanya inflasi spiral tidak menyurutkan perhatian Liz Truss pada masyarakat. Namun, kapan dan dengan apa stimulus daya beli tersebut digunakan, hingga sekarang belum memiliki keputusan final seiring banyaknya kritik terhadapnya (theguardian.com., 4 September 2022)

Inflasi spiral secara definisi merupakan peningkatan jumlah uang beredar yang kemudian berkonsekuensi kepada kenaikan upah (Chang,2018). Banyak ekonom yang menyebut inflasi spiral sebagai inflasi yang tidak terkendali. Dengan kata lain, angka sepuluh persen yang terjadi di Inggris merupakan situasi yang sejatinya kurang wajar. Namun, karena inflasi spiral tersebut terjadi di Inggris yang memiliki daya tahan poundsterling yang nilainya konsisten, maka yang terjadi justru akan membuat sektor riil mampu bergerak, khususnya di negara berkembang melalui skema investasi asing langsung (FDI). Tidak hanya itu, inflasi spiral justru mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kenaikan harga justru memberi stimulus positif bagi kondisi keuangan sebuah negara. Meskipun Inggris kini sudah bukan lagi anggota Uni Eropa (*Brexit*) dan menyatakan diri keluar dari Zona Euro.

Inflasi spiral di Inggris mendapat respons dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS), the Fed, Jerome Powell. Menurut Powell pilihannya hanya ada dua, yaitu resesi berkepanjangan atau inflasi spiral. Berbeda dengan Inggris, AS lebih memandang resesi berkepanjangan sebagai

solusi likuiditas jangka panjang. Sementara itu bagi Inggris, inflasi spiral lebih menguntungkan karena kesejahteraan rakyat meningkat tanpa harus menurunkan harga barang. Persoalan inflasi spiral di Inggris tersebut coba dibahas dalam kajian singkat ini untuk dianalisis implikasinya terhadap Uni Eropa dan Indonesia.

Inflasi Spiral di Inggris

Daya tahan poundsterling (mata uang Inggris) di tengah inflasi spiral merupakan bukti bahwa situasi moneter di Inggris masih terkendali sebagaimana optimisme PM Inggris yang baru, Liz Truss. Sebagaimana diketahui, poundsterling merupakan alasan dari Inggris yang berani menyatakan diri keluar dari Uni Eropa. Ada atau tidaknya the Fed dalam menaikkan suku bunga kurang berpengaruh terhadap hegemoni poundsterling yang nilainya masih lebih tinggi dari Euro. Poundsterling masih menjadi mata uang dengan nilai tertinggi di dunia dan mampu bertahan di tengah terjadinya *currency war* antara AS dan China. Oleh karena itu, optimisme Liz Truss merupakan hal yang masuk akal mengingat inflasi spiral memiliki jalan melalui pengembangan investasi di luar Inggris, khususnya Asia Pasifik.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) telah memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada negara-negara anggota, khususnya negara-negara Asia Pasifik untuk bersiap melakukan konsolidasi fiskal. Hal tersebut dapat menjadi indikator adanya rush meskipun sejatinya *default* tidak bisa diprediksi sebagaimana kasus yang menimpa

Yunani pada tahun 2015. Apalagi jika ditelusuri lebih dalam, ekonomi dunia kini juga tengah dihadapkan pada krisis energi dan krisis pangan akibat perang Rusia dan Ukraina (Republika, 5 September 2022). Bahkan, fluktuasi harga minyak dunia turut mendorong dolar AS dan poundsterling untuk terus menguat. Di sisi lain, bahan baku industri menjadi semakin mahal sehingga biaya produksi (*cost production*) untuk infrastruktur juga meningkat. Artinya, produktivitas di seluruh negara sekarang ini sedang menurun dan pertumbuhan ekonomi secara umum sedang melamban. Dengan kata lain, mempercepat pembangunan infrastruktur sangat sulit dilakukan jika tidak memiliki konsorsium investor asing.

Asia Pasifik sekarang menjadi episentrum perekonomian global dengan menguasai mayoritas aliran produk barang dan jasa (GDP) dunia. Maka wajar persaingan ekonomi di Asia Pasifik juga semakin intensif dan kehadiran konsorsium bank khusus untuk sektor infrastruktur, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menjadi signifikan. Dengan kata lain, AIIB merupakan solusi untuk melakukan distribusi investasi yang mampu memenuhi ekspektasi infrastruktur dan properti. Sedangkan Inggris merupakan negara kaya yang memiliki kelebihan dana (*Sovereign Wealth Funds/SWF*) yang di dalamnya terdapat likuiditas yang tinggi.

Likuiditas yang tinggi tersebut berpotensi digunakan untuk membiayai proyek-proyek di negara berkembang. Banyak negara *commonwealth* yang terbukti

memiliki cadangan devisa yang tinggi sehingga bisa menjadi andalan negara-negara Asia Pasifik pada masa mendatang daripada mengedepankan ketergantungan kepada China dan AS. AS terlihat sangat mengandalkan suku bunga sebagai cara untuk mempertahankan dominasi dolar secara kuantitas, sedangkan poundsterling tetap konsisten untuk mempertahankan kualitas.

Implikasi terhadap Uni Eropa dan Indonesia

Secara kalkulatif, resesi ekonomi yang terjadi di suatu negara bisa disebabkan oleh terjadinya overproduksi (*over production*) dan tingkat konsumsi yang menurun (*underconsumption*). Ketika pasar tidak lagi mampu menopang, maka surplus ekonomi negara investor harus ditransfer ke negara berkembang, seperti Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dan murah sekaligus mitra produksi. Indonesia dan Uni Eropa dengan minimnya industri dasar untuk infrastruktur seperti kawat dan paku, secara hitungan akan menyumbang aliran modal keluar (*capital outflow*) lebih besar untuk memperkuat perekonomian Inggris. Dengan kata lain, investasi besar akibat inflasi spiral adalah strategi *shifting risk* (menggeser risiko) *financial bubble* ke Indonesia.

Indonesia bukan negara dengan kapasitas cadangan devisa yang tinggi seperti Uni Emirat Arab. Implikasinya, pertumbuhan GDP Indonesia tahun mendatang hanya akan ditopang oleh sektor konsumsi dan impor sehingga ketergantungan terhadap negara investor sangatlah tinggi. Secara

artifisial, proyek infrastruktur memang menguntungkan ditinjau dari nilai investasi yang diharapkan seiring dengan semakin mudahnya akses perbankan melalui skema inklusi keuangan. Tidak hanya itu, terdapat banyak problem teknis internal yang sudah dibenahi Indonesia. Sebagai contoh *public private partnership* (PPP) yang direkomendasikan Asian Development Bank (ADB) yang berpotensi melakukan fungsi koordinatif dengan bank tanah demi implementasi pembangunan infrastruktur secara cepat. Mekanisme PPP memberi porsi besar bagi swasta sehingga miskoordinasi antara pelaksana proyek dan pemerintah bisa terjadi. Kedua, dengan problem regulasi otonomi daerah yang memberikan jalan pintas transaksi antara investor dan pimpinan daerah, maka pembangunan daerah sering tidak sejalan dengan agenda pembangunan nasional

Uni Eropa sedang menunggu perdebatan tentang apakah suku bunga perlu untuk dinaikkan Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan depan. Penentang kenaikan suku bunga bersikeras menduga perang Rusia-Ukraina merupakan akar permasalahan dari tingginya inflasi. Bahkan, Gubernur Bank Sentral Yunani mengatakan problem pasokan mengalami gangguan seiring fakta yang menunjukkan bahwa Rusia menghentikan aliran gas ke Eropa yang kemudian berujung pada tingginya harga energi dan komoditas serta pangan. Sedangkan pihak yang setuju kenaikan suku bunga memandang bahwa suku bunga yang sempat mengalami nol persen sejak Juli

lalu menjadi penting untuk meredam rekor-rekor baru inflasi yang tengah terjadi di Eropa. Bukti bahwa inflasi sudah terjadi sebelum agresi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 menunjukkan bahwa tidak benar jika harus menunggu resolusi perang Rusia-Ukraina untuk menaikkan suku bunga (kompas.id., 2 September 2022).

Prakondisi tersebut diprediksi akan menjadi ancaman bagi Zona Euro yang diprediksi juga akan menginjak angka inflasi sebesar 10 persen pada akhir tahun. Padahal estimasi dari Uni Eropa, target inflasi adalah dua persen, yang berarti meleset delapan persen. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, bahkan pernah mengingatkan Eropa akan terpuruk dengan inflasi 5 persen.

Tentu inflasi 10 persen adalah jumlah mengejutkan yang akan membuat banyak sekali ketidakpastian finansial. Jerman, misalnya, menghadapi inflasi pada level tertinggi sejak lima puluh tahun terakhir. Turki bahkan menjadi negara dengan inflasi mencapai 70 persen. Meskipun Turki belum mampu untuk menjadi negara Uni Eropa, inflasi di Turki juga berpengaruh terhadap Zona Euro. Beberapa sumber mencatat bahwa Jerman dan Italia, yang masuk kategori negara pelopor Uni Eropa (*the Inner Six*), juga mengalami inflasi terbesar dalam sejarah mereka. Tidak hanya itu, Latvia, Lithuania, dan Estonia juga mencatat angka di atas 20 persen yang berarti perang Rusia dan Ukraina cukup determinan dalam menaikkan

harga, khususnya sektor pangan (Kompas, 20 Agustus 2022).

Seperti berlayar di tengah ombak, maka mempercepat infrastruktur dengan hutang adalah perjudian. Justru sebaliknya, Indonesia dituntut memacu industrialisasi domestik guna mendorong akumulasi profit lebih cepat agar bisa segera melakukan pembayaran hutang luar negeri. Seharusnya inflasi Eropa memberi pelajaran bahwa tingginya *bubble* berpotensi menghasilkan resesi berkepanjangan jika tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan sektor riil. Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada karena investasi berpotensi *crash* jika tidak diimbangi produktivitas tinggi.

Penutup

Dari segi moneter, Kerja Sama Kemitraan Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa berisiko tinggi dalam kondisi ketidakpastian akibat inflasi spiral. Belum lagi perpecahan partai politik, mafia hukum, dan isu korupsi, dapat menciptakan ketidakpercayaan pasar di tengah tingginya ekspektasi investasi di Indonesia. Melihat serangkaian persoalan tersebut, maka solusi untuk mengatasi krisis investasi bukan pada kebijakan ekonomi, tetapi pada afirmasi politik. Undang Undang *Omnibus Law* dan beberapa peraturan lain yang dikritik publik dan sedang akan di-*judicial review* membuat investor tentu akan berpikir ulang untuk menyimpan uang di negara yang tidak memberi kepastian hukum. Oleh karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur harus diperkuat melalui konsolidasi politik, baik melalui kesadaran pemerintah maupun masyarakat sipil.

Diplomasi parlemen Indonesia oleh DPR RI mendapatkan momentumnya dalam KTT ke-8 P-20 dengan mengupayakan lahirnya alternatif baru selain CEPA. Masuknya Inggris sebagai negara investor sangat memungkinkan untuk terealisasi mengingat Asia Pasifik, AS, dan China sedang disibukkan oleh perang mata uang. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, inflasi spiral di Inggris dapat disiasati dengan transfer investasi ke negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia dengan prioritas pembangunan infrastruktur. DPR RI melalui fungsi pengawasan, termasuk melalui rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri perlu memastikan bahwa inflasi spiral yang terjadi di Inggris dan Eropa tidak akan membawa dampak negatif kepada Indonesia, tetapi sebaliknya bisa dimanfaatkan untuk membangun kerja sama konstruktif, antara lain melalui skema investasi asing langsung untuk membiayai pembangunan sektor infrastruktur.

Referensi

- Chang, Kia-Ingau. 2018. *The Inflationary Spiral: The Experience in China 1939-1950*, Massachusetts: MIT Press.
- "Inflasi Boris Johnson Minta Maaf Tak Bisa Beri Bantuan Warga", 26 Agustus 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1588511/inflasi-boris-johnson-minta-maaf-tak-bisa-beri-bantuan-ke-warga>, diakses 7 September 2022.
- "Inflasi di Zona Euro, Terbang ke Bulan", *Kompas*, 20 Agustus 2022, hal. 4.
- "Inflasi Spiral Melanda Turki dan Inggris", 2 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/>

internasional/2022/08/19/inflasi-spiral-melanda-turki-dan-inggris, diakses 7 September 2022.

“Truss Poised to Plunge UK Economy into Inflation Spiral”, 22 Agustus 2022, <https://www.theguardian.com/business/2022/aug/22/truss-poised-to-plunge-uk-economy-into-inflation-spiral-says-sunak>, diakses 7 September 2022.

“Truss to push ahead with low-tax economy despite calls for caution”, 4 September 2022, <https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/04/liz-truss-energy-prices-action-plan>, diakses 6 September 2022.

“Waspada Inflasi”, *Republika*, 5 September 2022, hal.1.



Ziyad Falahi
ziyad.falahi@dpr.go.id

Ziyad Falahi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2010. Lulus S-2 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2012. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.